

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

NI LUH PUTU YUNI ADIPURYANTI¹

I KETUT SUDIBIA²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: yuniadipuryanti@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2013. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan distribusi pendapatan, jumlah penduduk yang bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

The difference in economic growth between regions would lead to unequal distribution of income. Unequal distribution of income can be caused by several factors, including uneven amount of labor and investment in an area. The purpose of this study was to analyze the effect of directly or indirectly the working population and the investment of the unequal distribution of income through economic growth in the district/city in the province of Bali. This research uses secondary data from 2007-2013. This study uses data collecting non-participant observation. The analysis technique used is path analysis. Based on the analysis found that the number of people who work and investment positive and significant impact on economic growth. Economic growth is positive and significant effect on the unequal distribution of income. Meanwhile, the number of people working and investing no significant effect on inequality of income distribution. Economic growth is a variable mediating the indirect influence of the working population and the investment of the unequal distribution of income.

Keywords: inequality of income distribution, the number of working population, investment, economic growth

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berpengaruh antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Arsyad, 2010:11).

Pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya

pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh perubahan pada distribusi output dan struktur ekonomi, peningkatan kontribusi sektor industri dan jasa, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja (BPS Provinsi Bali, 2014:79). Dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Mahesa (2013) mengatakan bahwa proses pembangunan lebih mengarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	1.663.345	1.739.284	1.836.900	1945292	2.049.927
Tabanan	2.342.711	2.475.716	2.619.688	2774394	2.941.821
Badung	5.528.320	5.886.369	6.280.211	6738908	7.170.966
Gianyar	3.187.823	3.380.513	3.609.056	3854011	4.101.807
Klungkung	1.240.543	1.307.889	1.383.890	1467352	1.551.109
Bangli	1.040.363	1.092.116	1.155.899	1225104	1.293.885
Karangasem	1.747.169	1.836.132	1.931.439	2042135	2.160.734
Buleleng	3.266.343	3.457.476	3.668.884	3907936	4.170.207
Denpasar	5.358.246	5.710.412	6.097.167	6535171	6.962.611
Bali	27.290.946	28.882.494	30.757.776	32.804.381	34.787.963

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

suatu daerah salah satunya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas yang tidak terjadi secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu (Musfidar, 2012).

Sejak tahun 2001 telah diberlakukan otonomi daerah di Indonesia, kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya (Masli, 2007). Keberadaan undang-undang tersebut memberikan kewenangan semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huther dan Shah (1998) mengamati bahwa desentralisasi fiskal memperlebar antara daerah yang kaya dan yang miskin, *mismanagement macroekonomi* dan meningkatnya korupsi. Lindaman dan Thurmaier (2002) juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi, ketimpangan antar daerah dan sebagainya.

Provinsi Bali yang memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah yang berbeda setiap wilayahnya, telah mengalami ketimpangan distribusi pendapatan (Gama, 2009). Gejala ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat digambarkan pada Tabel 1 dengan menggunakan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009

sampai tahun 2013.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2014) pada Tabel 1 menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami ketimpangan. Hal tersebut terlihat dari Kabupaten Badung yang menduduki peringkat tertinggi dalam PDRB kabupaten/kota selama tahun 2009-2013, kemudian disusul oleh Kota Denpasar. Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara PDRB Kabupaten Badung (peringkat tertinggi) dengan Kabupaten Bangli (peringkat terendah). Rentangan nilai perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut, sehingga tercermin suatu ketimpangan distribusi pendapatan antara daerah tertinggal (Bangli) dengan daerah maju (Badung). Hal tersebut terjadi karena kebanyakan sektor berpusat di Kabupaten Badung sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Bali.

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Dewangga, 2011). Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2008) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja (Soenandar, 2005). Fleisher *et al.* (2007) mengatakan

bahwa faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Selain memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004:235). Selain itu, ketimpangan antar wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju (Cherodian dan Thirlwall, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu akan terus mengalami perubahan, output per kapita mengaitkan aspek output total dan aspek jumlah penduduk, dan jangka panjang digambarkan sebagai kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh perubahan intern perekonomian (Arsyad, 2010:11).

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dalam Hidayat, 2014). Menurut Haris (2014) ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan fenomena yang masih perlu diperhatikan di Bali, apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Saat ini, banyak penduduk yang melakukan migrasi dan urbanisasi melihat peluang kerja di Provinsi Bali semakin besar. Dengan situasi seperti ini,

bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur penduduk, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk yang bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2014), pada tahun 2013 jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Bali telah mencapai 2.273.897 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang bekerja yang cukup tinggi maka seharusnya dapat membantu pembangunan, namun jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan.

Menurut Smith (dalam Irawan, 2002:23) pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan (Musfidar, 2012). Hal yang serupa dikatakan pula oleh Kiguru dkk. (2013) pada penelitiannya yang dilakukan di Kenya bahwa pertumbuhan penduduk baik yang bekerja atau tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan populasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di pihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2000:204).

Musfidar (2012) dalam penelitiannya di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa. Mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Pangemanan (2001) dalam studinya menggunakan metode GLS dengan menggunakan *fixed effect*, dengan

hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa kenaikan penduduk usia 60 tahun ke atas secara signifikan menurunkan distribusi pendapatan, karena penduduk usia lanjut mayoritas berada pada kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena ketidakmerataan distribusi pendidikan. Kenaikan proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena adanya kesenjangan tingkat upah yang cukup tinggi antar pekerja yang bekerja di sektor industri pengolahan, dimana sebagian kecil pekerja bekerja sebagai manajer, teknisi, dan atau yang memiliki keahlian tinggi.

Menurut Jhingan (2004:229), sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod Domar, bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Bhinadi (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Peningkatan investasi (barang modal) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan jika investasi berkurang maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Menurut Kunle *et al.* (2014), pertumbuhan ekonomi secara langsung berkaitan dengan arus masuk investasi asing. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi arus masuk investasi. Ini berarti bahwa investasi swasta merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2011:271) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Penurunan investasi akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional menurun di bawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi masuk ke dalam suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Zaris (1987) dan Wahyuni, dkk. (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa investasi swasta memiliki peran penting dalam pola pembangunan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah tertentu. Namun, investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena sebagian investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau

keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi (Haris, 2014). Data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2014), menunjukkan bahwa investasi swasta kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pembangunan di Provinsi Bali hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah yang relatif lebih maju, sedangkan bagi daerah-daerah yang kurang berkembang belum menjadi fokus pembangunan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2014), sebagian besar jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan laju pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun distribusi pendapatan yang ditunjukkan dengan indeks gini rasio kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan juga. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali?
- 2) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali?
- 3) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai pengaplikasian teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jumlah penduduk yang bekerja dan investasi

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 2) Jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan paradigma asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan beberapa variabel yaitu pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali belum sepenuhnya merata di setiap kabupaten/kota yang cenderung berfluktuatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

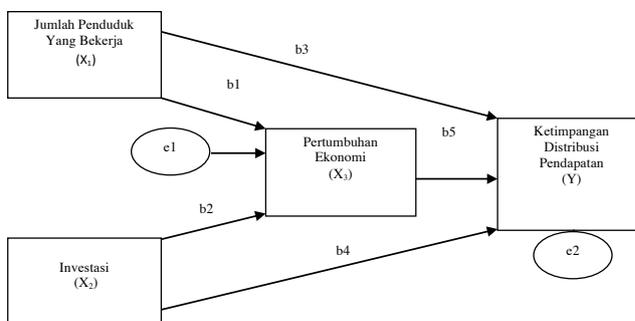
Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yaitu analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening. Penelitian pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2007-2013 dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dibuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan, yaitu.

$$X_3 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5X_3 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Gambar 1 Model Analisis Jalur



Keterangan:

X_1 = Jumlah Penduduk Yang Bekerja

X_2 = Investasi

X_3 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

e_1, e_2 = variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana Utama, 2008). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:
 Persamaan Struktural 1 : $X_3 = 0,344X_1 + 0,495X_2 + e_1$
 Persamaan Struktural 2 : $Y = -0,236X_1 + 0,223X_2 + 0,428X_3 + e_2$

Tabel 2 Ringkasan Koefisien Jalur

Regresi	Koef. Regresi Standar	Standar Error	z hitung	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow X_3$	0,344	0,000	3,207	0,002	Signifikan
$X_2 \rightarrow X_3$	0,495	0,000	4,608	0,000	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y$	-0,236	0,000	-1,495	0,140	Tidak signifikan
$X_2 \rightarrow Y$	0,223	0,000	1,316	0,193	Tidak signifikan
$X_3 \rightarrow Y$	0,428	0,014	2,441	0,018	Signifikan

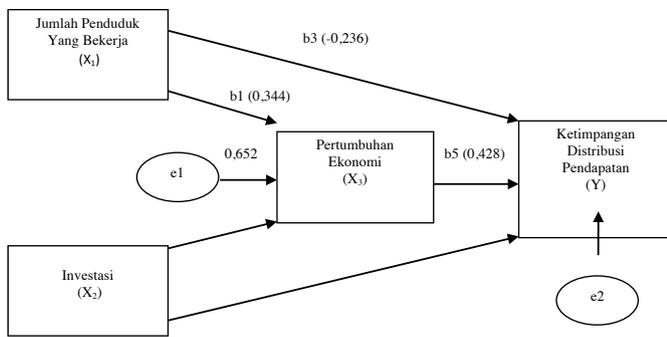
Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 2 menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk yang bekerja (X_1) dan investasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (X_3). Variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y). Sementara itu, variabel jumlah penduduk yang bekerja (X_1) dan investasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y).

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur di atas maka dapat dibuat diagram jalur seperti dibawah ini.

b_3 (-0,236)

Gambar 2
Diagram Analisis Jalur Penelitian



Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Gambar 2 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel seperti berikut.

Tabel 3 Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Variabel	X1			X2		
	PL	PTL	TP	PL	PTL	TP
X3	0,344	-	0,344	0,495	-	0,495
Y	-0,236	0,147	-0,089	0,223	0,212	0,435

Sumber: Data diolah, 2015

Keterangan:

- PL = Pengaruh Langsung
- PTL = Pengaruh Tidak Langsung
- TP = Total Pengaruh
- X1 = Jumlah Penduduk Yang Bekerja
- X2 = Investasi
- X3 = Pertumbuhan Ekonomi
- Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk mengetahui nilai e_1 dan e_2 dihitung dengan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,575} = 0,652$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,228} = 0,879$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total yang hasilnya sebagai berikut:

$$R^2m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2$$

$$R^2m = 1 - (0,652)^2 - (0,879)^2$$

$$R^2m = 0,672$$

Keterangan:

R^2m = Koefisien determinasi total

e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Koefisien determinasi total atau R Square sebesar 0,672 mempunyai arti bahwa sebesar 67,2 persen variasi ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi model yang dibentuk oleh jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya yaitu 32,8 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang dibentuk.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan

program SPSS untuk menguji pengaruh langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,344 dan nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan penelitian Musfidar (2012) dan Fleisher *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,495 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hubungan positif antara variabel investasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, teori Harrod-Domar, penelitian Kunle *et al.* (2014) serta penelitian Wahyuni dkk (2014) yang mengatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,236 dan nilai probabilitas sebesar $0,140 > 0,05$. Hal ini berarti jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian Pangemanan (2001) yang menyatakan bahwa kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga, karena ketidakmerataan distribusi pendidikan.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,223 dan nilai probabilitas sebesar $0,193 > 0,05$. Hal ini berarti investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wahyuni, dkk. (2014), dimana investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali selama

2000-2012 meningkat.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, didapatkan Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,428 dan nilai probabilitas sebesar $0,018 < 0,05$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Kuznets (dalam Arsyad, 2010:293) bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_1}^2 + b_1^2 S_{b_5}^2}$$

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{(0,428)^2(0,000)^2 + (0,344)^2(0,014)^2}$$

$$S_{b_1b_5} = 0,00482$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka harus menghitung nilai z (uji t-hitung) dari koefisien $S_{b_1b_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{b_1b_5}{S_{b_1b_5}}$$

$$z = 30,546$$

Oleh karena z hitung sebesar $30,546 > 1,64$, hal ini berarti jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hubungan jumlah penduduk yang bekerja dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow Y &= (b_1 \times b_5) \\ &= (0,344 \times 0,428) \\ &= 0,147 \end{aligned}$$

Pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_2}^2 + b_2^2 S_{b_5}^2}$$

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{(0,428)^2(0,000)^2 + (0,495)^2(0,014)^2}$$

$$S_{b_2b_5} = 0,00693$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka harus menghitung nilai z (uji t-hitung) dari koefisien $S_{b_2b_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{b_2b_5}{S_{b_2b_5}}$$

$$z = 30,57$$

Oleh karena z hitung sebesar $30,57 > 1,64$, hal ini berarti investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hubungan investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Besarnya pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow Y &= (b_2 \times b_5) \\ &= (0,495 \times 0,428) \\ &= 0,212 \end{aligned}$$

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pertama, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kedua, jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketiga, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah, pertama, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kedua, pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten-kabupaten yang selama

ini memiliki investasi rendah. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Keempat, pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang dunia usaha agar peluang usaha semakin terbuka sehingga kebutuhan akan tenaga kerja bertambah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Alfaro, Laura. 2003. Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter?. *JEL Classification: F23, F36, F43*. Harvard Business School.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi ke 1. Yogyakarta: BPFE.
- , 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Afandi. 2014. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus 2001-2010). *Jurnal Ekonomi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2008. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2009. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2009. *PDRB Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2004-2008*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2010. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2011. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2012. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2013. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2014. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2014. *PDRB Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2009-2013*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Barro, Robert J. 1999. Inequality, Growth, And Investment. *NBER Working Paper*, No. 7038. Cambridge.
- Borensztein, J, De Gregorio dan Lee. 1997. How Does Foreign Investment Affect Economic Growth?. *Journal of International Economics* 45, pp: 115-135. International Monetary Fund, Research Department, Washington DC, USA.
- Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8 (1), hal: 39-48. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Cetakan ke 7. Yogyakarta: BPFE.
- Caska dan Riadi. 2008. Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Industri dan Perkotaan*. 12 (21), hal: 1629-1642. FKIP Universitas Riau
- Cherodian, Rowan dan A. P. Thirlwall. 2013. Regional Disparities in Per Capita Income in India: Convergence and Divergence?. *Discussion Papers*. School of Economics, University of Kent, Canterbury, Kent.
- Dewangga, Linggar dan Achma Hendra. 2011. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Estudillo, Jonna P. 1997. Income Inequality In The Philippines 1961-91. *The Developing Economics*. 35 (1), pp: 68-95. University of Hawaii.
- Fleisher, Belton, Haizheng Li dan Min Qiang Zhao. 2007. Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. *IZA Discussion Paper*, No. 2703. Department of Economics, The Ohio State University.
- Gama, Ayu Savitri. 2009. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. 2 (1), hal: 38-48. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Gebbert, Kurt, Michael Happich dan Andreas Stephan. 2005. Regional Disparities in The European Union: Convergence and Agglomeration. *German Institute of Economic Research*. DIW Berlin.
- Haris, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi Sarjana Jurusan IESP pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang
- Huther, Jeft dan Anwar Shah. 1998. Applying a simple measure of Good Governance to debate on Fiscal Decentralization. USA.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke 6. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kiguru, Gideon, Gachanja Paul dan Obere Almadi. 2013. The Impact of Population Change On Economic Growth In Kenya. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 2 (6), pp: 43-60. Kenyatta University.
- Kusumastanto, Triyodo. 1996. Investment Strategy for The Development of Fisheries Sektor In Indonesia: An Application A Dynamics Regional Economics Allocation Model (DREAM). *Buletin Ekonomi Perikanan* No. 2 Tahun ke 2, hal. 42-51. Fakultas Perikanan IPB.
- Lindaman, Kara dan Kurt Thurmaier. 2002. Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Need and Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Development and Cultural Change*. 50 (4), pp: 915-934. The University of Chicago.
- Kunle, Adeleke, Olowe dan Oluwafolakemi. 2014. Impact of Foreign Direct Investment on Nigeria Economics Growth. *International Journal of Academic Research*, 4 (8), pp: 234-242. Business and Social Sciences
- Mahesa, Ngakan Putu. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*. 2 (3), hal: 119-128. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Masli, Lili. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.
- Mukhamad, Rizal. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang (Studi Kasus Pada Tahun 1998-2012). *Jurnal Ekonomi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*, Makasar.
- Pangemanan, Lyndon. 2001. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakerataan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 1980-1996. *Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Samuelson, Paul. A dan William D. Nordhaus. 1990. *Ekonomi*. Edisi ke 12. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 1. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 17. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi ke 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2011. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Soenandar, Ersi S. 2005. Government Policy In Solving Uneven Regional Development Between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *Economic Journal*, 34, pp: 171-192. Hokkaido University.
- Tabassum, Amina dan Tariq Majeed. 2008. Economic Growth and Income Inequality Relationship: Role of Credit Market Imperfection. *The Pakistan Development Review*, 47 (4), pp: 727-743. Economics Department Quaid-i-Azam University, Islamabad.
- Todaro, Michael P. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- . 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 5, Cetakan ke 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke 8. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, Putri, Made Sukarna dan Nyoman Yuliarmi. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3 (8), hal. 458-477. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Yeniwati. 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2 (3), hal. 1-21. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Zaris, Roeslan. 1987. *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: LPFE UI.